

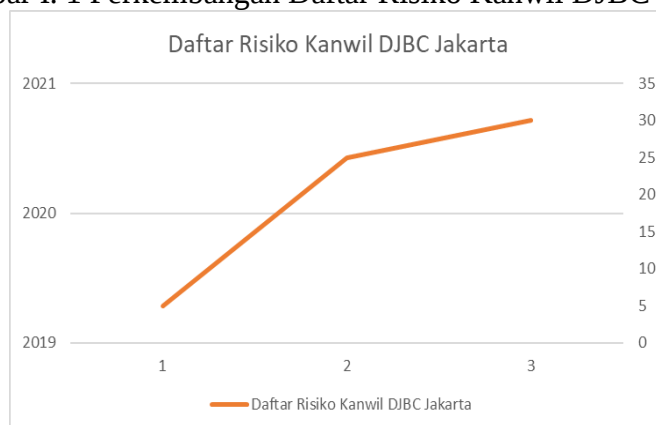
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam menjalankan aktivitas sehari-hari selalu berhadapan dengan risiko. (Sudarmawan, 2020) mengungkapkan bahwa setiap kegiatan dalam kehidupan manusia selalu mengandung risiko. Demikian juga Kanwil DJBC Jakarta sebagai institusi di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ada dalam lingkup Kementerian Keuangan, seiring berjalannya waktu risiko yang dihadapi semakin tinggi. Sejak tahun 2019 hingga 2021 jumlah risiko yang dihadapi Kanwil DJBC Jakarta meningkat tajam dari 5 risiko menjadi 30 risiko di tahun 2021, sebagaimana dirinci pada grafik berikut :

Gambar I. 1 Perkembangan Daftar Risiko Kanwil DJBC Jakarta



Sumber : Kantor Wilayah DJBC Jakarta (Jakarta, 2019-2021)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia risiko memiliki arti akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Dari definisi tersebut risiko dipandang sebagai sesuatu yang buruk dan perlu dihindari, sehingga terhadap risiko-risiko yang mungkin timbul perlu dikelola dengan bijak.

Pengelolaan risiko diwujudkan dengan suatu mekanisme manajemen risiko. Manajemen Risiko adalah rangkaian kebijakan, prosedur yang lengkap yang dimiliki organisasi untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan organisasi terhadap risiko (Arta, et al., 2021). Kesadaran untuk mengelola risiko di kalangan perusahaan telah muncul sejak puluhan tahun yang lalu. Pada tahun 1990-an, terjadi perkembangan sistem manajemen risiko pada tahun ini manajemen risiko perusahaan tidak hanya terbatas pada manajemen risiko asuransi dan manajemen risiko keuangan saja. Hal tersebut sejalan dengan perkembangan ilmu manajemen, yang lebih menekankan pentingnya *corporate* strategi dalam mencapai tujuan perusahaan misalnya dalam meningkatkan nilai (*value*) perusahaan (Djajadikerta, 2004).

Pentingnya penggunaan manajemen risiko dalam berbagai aspek kehidupan mendorong lahirnya suatu standar implementasi manajemen risiko yang dapat diterapkan pada ranah organisasi hingga ranah individu. ISO 31000:2009 merupakan standar penerapan manajemen risiko pertama yang diterbitkan oleh *International Standardization Organization*. Kemudian pada tahun 2018 organisasi yang sama melakukan pembaruan pada definisi, prinsip, kerangka kerja, dan proses. Selanjutnya ISO 31000:2009 digantikan dengan ISO 31000:2018 yang masih

berlaku hingga kini. Terdapat perbedaan definisi risiko antara KBBI, ISO 31000:2009 dengan ISO 31000:2018. ISO 31000:2018 mendefinisikan risiko sebagai efek ketidakpastian terhadap sasaran atau ketidakpastian yang berdampak (efek) pada sasaran. (Catatan 1) : efeknya adalah penyimpangan (deviasi) dari sasaran yang diharapkan. Dapat berupa efek positif, negatif, atau keduanya dan dapat diatasi, melahirkan peluang dan ancaman (Balladho, 2018). Manajemen risiko dijalankan secara khusus untuk tujuan tertentu. Tujuan manajemen risiko adalah untuk menciptakan dan melindungi nilai. Menurut (Balladho, 2018) manajemen risiko merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian sasaran.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyadari pentingnya manajemen risiko bagi organisasinya, oleh karena itu Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah mulai menerapkan manajemen risiko sejak tahun 2009 dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 191/PMK.07/2008 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan. Saat ini Kementerian Keuangan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK 577/KMK.01/2019 yang telah disesuaikan dengan perkembangan standar manajemen risiko ISO 31000:2018 (Rose, 2020). ISO 31000:2018 yang bersifat umum telah diadopsi dan disesuaikan dalam KMK 577/KMK.01/2019 sehingga menjadi relevan dan dapat diterapkan untuk mengelola risiko yang dihadapi oleh Kementerian Keuangan.

Kantor Wilayah DJBC Jakarta tunduk dan turut mengemban tugas dan tanggung jawab untuk mencapai sasaran organisasi Kementerian Keuangan serta

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam proses pencapaian sasaran organisasi tidak dapat luput dari risiko. Hal ini tercermin dari daftar kejadian risiko yang telah diidentifikasi Kantor Wilayah DJBC Jakarta pada tahun 2021 sebanyak 30 kejadian risiko. Secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel I. 1 Daftar Risiko Kanwil DJBC Jakarta Tahun 2021

No	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko
1.	Insentif fiskal yang tepat sasaran	Terdapat perusahaan yang belum menerapkan IT Inventory sesuai ketentuan
2.	Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	Penyalahgunaan peruntukan penggunaan etil alcohol yang mendapat fasilitas pembebasan cukai
		Kekalahan sengketa banding di pengadilan pajak atas keputusan yang ditetapkan oleh Kanwil DJBC Jakarta
		Realisasi penerimaan bulanan tidak mencapai trajectory/target yang telah ditentukan
		Wajib pajak dalam Daftar Sasaran Analisis Bersama (DSAB) tidak dapat ditindaklanjuti
		Potensi temuan atas wajib pajak dalam Daftar Sasaran Analisis Bersama (DSAB) tidak dapat ditindaklanjuti
3.	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	Adanya temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai yang tidak dapat ditindaklanjuti
		Jumlah LHA tidak mencapai target
		Jangka waktu pemenuhan P-19 yang lama
		Resistensi fisik dalam proses penindakan
4.	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	Adanya keluhan pengguna jasa terkait pelayanan
5.	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan	Adanya pelanggaran pengguna jasa atas ketentuan KB
		Adanya piutang lancar yang sudah jatuh tempo tapi belum dilunasi
6.	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	Tidak selesainya kajian sesuai jadwal

7.	Persepsi positif dan dukungan public terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	Adanya janji layanan percepatan perizinan kepabeanan dan cukai yang terpenuhi
		Bentuk penyampaian informasi mengenai kepabeanan dan cukai yang kurang variatif
		Berita negatif yang dimuat oleh media nasional terpercaya
		Penipuan atas barang kiriman dari luar negeri yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan pegawai Bea dan Cukai
		Berita negatif terkait pelayanan atau penindakan pegawai bea dan cukai yang dimuat oleh media nasional terpercaya
8.	Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	Pelaksanaan operasi Barang Kena Cukai (BKC) yang tidak menghasilkan penindakan
		Pelaksanaan patroli laut tidak dapat menghasilkan penindakan
9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang optimal	Adanya OTT, pungli, gratifikasi, dan tindakan korupsi
		Temuan APF belum tuntas ditindaklanjuti secara tepat waktu
		Adanya pegawai yang melakukan tindakan indisipliner
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Program kerja yang ditetapkan tidak tercatat
		Penyampaian laporan MR ke Direktorat PPS tidak tepat waktu
		Pegawai DJBC tertular virus Covid-19
11.	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif	Tidak terpenuhinya jadwal rencana penarikan dana
		Rendahnya kualitas pelaksanaan anggaran
		Penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab bendahara pengeluaran

Sumber : Kantor Wilayah DJBC Jakarta (Jakarta, Daftar Risiko, 2021)

Untuk mencapai sasaran organisasi, risiko-risiko tersebut perlu dikelola, Kantor Wilayah DJBC Jakarta menerapkan manajemen risiko dengan berpedoman pada KMK 577/KMK.01/2019 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan. Tema yang diangkat pada karya tulis ini adalah implementasi manajemen risiko sebagaimana diatur dalam KMK 577/KMK.01/2019 yang berbasis ISO 31000:2018 pada Kanwil DJBC Jakarta.

Karya tulis ini akan membandingkan teori, praktek, dan hasil yang berkaitan dengan proses manajemen risiko yang dapat dilihat dari dokumen manajemen risiko Kantor Wilayah DJBC Jakarta. Penelitian ini akan dituangkan ke dalam suatu karya tulis tugas akhir dengan judul **“IMPLEMENTASI KMK 577/KMK.01/2019 BERBASIS ISO 31000:2018 DALAM PENGELOLAAN RISIKO PADA KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang tersebut, pokok masalah yang akan dibahas dalam Karya Tulis ini adalah :

1. Apakah proses manajemen risiko di Kantor Wilayah DJBC Jakarta telah sesuai dengan pedoman KMK 577/KMK.01/2019 yang berstandar ISO 31000:2018?
2. Seberapa tingkat efektivitas proses manajemen risiko dapat mendukung tercapainya IKU Kantor Wilayah DJBC Jakarta?

1.3 Tujuan Penulisan

Ada beberapa tujuan yang ingin diperoleh dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini antara lain :

1. Mengetahui kesesuaian atas proses manajemen risiko di Kantor Wilayah DJBC Jakarta dengan pedoman KMK 577/KMK.01/2019 yang berstandar ISO 31000:2018.
2. Mengetahui tingkat efektivitas proses manajemen risiko dalam mendukung tercapainya IKU di Kantor Wilayah DJBC Jakarta.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

1. Keterkaitan proses manajemen risiko pada KMK 577/KMK.01/2019 dan ISO 31000:2018.
2. Menganalisis penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Jakarta pada tahun 2021 yang berpedoman pada KMK 577/KMK.01/2019 dengan standar ISO 31000:2018.
3. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi Kantor Wilayah DJBC Jakarta dalam melakukan pengelolaan risiko berpedoman pada KMK 577/KMK.01/2019 berbasis ISO 31000:2018.

1.5 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan Karya Tulis Tugas Akhir sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

- a. Mengukur dan mengetahui tingkat kesesuaian praktik pengelolaan risiko yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Jakarta dengan KMK 577/KMK.01/2019 yang berstandar ISO 31000:2018.
- b. Melakukan analisis dan memberikan solusi terhadap hambatan yang dihadapi organisasi dalam pelaksanaannya untuk menerapkan KMK 577/KMK.01/2019 yang berstandar ISO 31000:2018 dalam proses pengelolaan risiko di Kantor Wilayah DJBC Jakarta.
- c. Memberikan informasi dan masukan untuk praktik pelaksanaan pengelolaan risiko yang belum sesuai dengan KMK 577/KMK.01/2019 yang berstandar ISO 31000:2018 dalam rangka mencapai pengelolaan risiko yang efektif.

- d. Penelitian ini dapat menjadi referensi karya ilmiah bagi PKN STAN terutama bagi peneliti selanjutnya yang akan mengulas topik seputar manajemen risiko

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Karya tulis tugas akhir ini terdiri dari 4 bab dengan urutan pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini, menyajikan uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, dan manfaat penulisan yang masing-masing tertuang dalam subbab tersendiri serta diakhiri dengan sistematika penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori/ketentuan yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam KTTA.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan dan pembahasan hasil.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini mengemukakan simpulan yang ditarik dari uraian pada bab-bab sebelumnya dan memberikan saran atas permasalahan yang dibahas dalam KTTA.